

**PUTUSAN TIDAK DITERIMA
(NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)
TERHADAP PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN KEDUA
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
(Studi Atas Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sajana Hukum Islam (SHI)**

**oleh:
Abdulloh Mahrus Zain
NIM. 06210093**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2011**

**PUTUSAN TIDAK DITERIMA
(NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)
TERHADAP PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN KEDUA
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
(Studi Atas Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

Oleh:

**Abdulloh Mahrus Zain
NIM. 06210093**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

**Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001**

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٧٤﴾

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wata'ala atas semua rahmat dan hidayahnya, kupersembahkan karyaku ini kepada:

Kedua orang tuaku yang selalu memberikan curahan kasih sayang, perhatian, dukungan, kepercayaan, serta doanya, dan memberikan kesempatan ananda untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Seluruh jerih payah dan perjuangan beliau merupakan pendorong semangatku untuk berpacu menuntut ilmu, meraih kesuksesan dan meraih cita-cita untuk melangkah di hari yang akan datang.

Kepada saudara-saudaraku di rumah dan teman-teman seangkatan yang mana kalianlah yang menjadi inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, semoga amalan kalian semua mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Kepada keluarga besar bapak Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum yang senantiasa memberikan waktu bimbingan, motivasi, mau'idzah hasanah, dan tempat yang nyaman sehingga penulis wawasannya bertambah dan dapat mendapatkan kenyamanan tempat dalam mengerjakan tugas.

Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang beserta semua aparat beserta karyawan dan khususnya bapak hakim yang memutus perkara yang menjadi topik bahasan skripsi ini yaitu Bapak Drs. H. Zainuri S.H., M.H semoga amal beliau semuanya dicatat oleh Allah SWT sebagai amal yang shaleh Amien Ya Robbal Alamin.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PUTUSAN TIDAK DITERIMA
(NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)
TERHADAP PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN KEDUA
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
(Studi Atas Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/PA.Kab.Mlg)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 23 Maret 2011

Penulis,

Abdulloh Mahrus Zain
NIM. 06210093

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin syukur kehadiranmu ya allah atas segala karunia, rahmat dan ridhomu. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku dekan fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan karyawan fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berbagi ilmunya dengan penuh tulus ikhlas.
5. Ibu dan Ayah yang telah memberikan dorongan materiil dan spiritual sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Saudara-saudaraku di rumah dan teman-teman di Tanah Air Indonesia tercinta

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu penulis mohon kritik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amin.

Malang, 23 Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi	v
Persetujuan Pembimbing	vi
Lembaran Pengesahan Skripsi	vii
Kata pengantar	viii
Daftar Isi	x
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Defini Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pembatalan perkawinan	20
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	20
2. Pernikahan Yang Dilarang Yang Dapat Diajukan Pembatalan	27
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	31
C. Izin Beristri Lebih Dari Satu Orang	32
D. Konsep Dasar Tentang Gugatan Atau Permohonan	38
E. Putusan	40
1. Pengertian Putusan	40
2. Macam-Macam Putusan	42
3. Tentang Pertimbangan Hukum	45
4. Konsep Tentang Putusan <i>Niet Onvankelijke Verklaard</i> / N.O.....	47
5. Permohonan / Gugatan Yang Dapat Diputus N.O.	47
F. Perkawinan Bagi Anggota TNI	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Deskripsi Tentang Perkaranya	51
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan N.O. Atas perkara nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg.....	55
C. Macam-Macam Pelanggaran Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg	62
D. Akibat Hukum Terhadap Putusan N.O. Atas Perkara Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg.....	67

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Mahrus Zain, Abdulloh, 06210093, 2011: Putusan Tidak Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg). Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Putusan tidak diterima, Permohonan, Pembatalan Perkawinan Kedua.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan perkawinan yang sah menurut Negara. Namun masih ada sebagian masyarakat yang cenderung melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, seperti perkara nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg, dimana pelanggaran berupa pemalsuan identitas diri dan pemalsuan surat ijin perkawinan dari atasan pejabat yang berwenang, sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan di KUA oleh salah satu pihak yang berperkara, dimana pelaku pemalsuan tersebut adalah seorang anggota TNI dan ternyata perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan yang dua. Disebut perkawinan kedua karena ia masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain selaku istri pertama. Namun dalam proses permohonan pembatalan perkawinannya yang kedua, Permohonan Pemohon oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dinyatakan tidak diterima dan sampai sekarang perkawinan tersebut masih tetap berlangsung. Maka kasus ini akan menarik untuk diteliti dari berbagai perspektif baik dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. *Kedua*, macam-macam pelanggaran yang terdapat dalam perkara tersebut dan yang *Ketiga*, adalah akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara tersebut.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pengumpulan datanya yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Dalam analisisnya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Oleh karena itu bahan hukum primer yaitu berupa putusan hakim maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur atau buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan. kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan yaitu: *Pertama*, Dalam perkara Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak diterima karena surat permohonan Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon mengandung cacat formal sebagai akibatnya surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dengan penerima kuasanya tidak sah menurut hukum. *Kedua* : Kuasa hukum Pemohon melanggar Skep.Menhankam.Nomor: Skep.168/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 yang berakibat Surat Kuasa Khusus yang dibuat menjadi prematur, bentuk pelanggaran berikutnya adalah yang dilakukan oleh Termohon I, ia melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama, tanpa izin Pengadilan Agama, dan melakukan pelanggaran pidana yang berupa pemalsuan identitas dan surat izin kawin dari atasan yang berwenang komandan lanud abdurachman saleh malang. *Ketiga*, Majelis hakim melalui amar putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak diterima dan sampai saat ini Pemohon tidak lagi mengajukan permohonan baru lagi kepada Pengadilan Agama kabupaten malang akibatnya perkawinan Termohon I dan Termohon II masih tetap berlangsung, tidak batal demi hukum namun hanya dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan melalui proses permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

ABSTRACTION

Mahrus Zain, Abdulloh, 06210093, 2011 : Decision Is Not Acceptable To Request Cancellation Of The Second Marriage In The District Of Malang Religious Courts (Studi Decision Number: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg).
Supervisor: Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

Keyword: Decision Is Not Acceptable, Request, Cancellation Of The Second Marriage

In The Act No. 1 Of 1974 concerning marriage and compilation of Islamic law, explained the legal marriage by country. But still there are some people who tend to engage in violations of these provisions, such as case numbers: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. where violations of forgery and falsification of identity permit the marriage of superior competent authority, as a condition of completeness of the administration of marriage in the religious affairs office by either party litigant, in wich the perpetrator counterfeiting is a member of national Indonesia army, and the marriage was performed is a second marriage. Called a second marriage because she is still bound by a valid marriage with another woman as the first wife. But in the procec of application for cancellation of the second marriage, request the applicant by the district of malang court stated religion is not accepted, and until now the marriage is still ongoing. Then the case will be interesting to be studied from various perspectives both from the perspective of the Compilation Of Islamic Law, or the law No. 1 Of 1974 concerning marriage.

From exposure to the above, the researcher is interested in knowing some of the issues contained in the formulation of the problem, namely: first, the basic consideration of the judge in deciding the case. Second, the various violations contained in the case, and the third is the legal effect of the decision handed down by judges on the case.

Researchers use this type of normative legal research, with the approach of the law data collection interview method and documentation. In the analysis, researchers use a descriptive method of analysis. Therefore of primary legal materials in the form of the judge's decision and secondary legal materials derived from the literature or reading books that are relevant to the subject. The analyzed to the conclusion that: *First*, in case number: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg, the judges ruled the petition was not accepted because the applicant who made and signed by the applicant's attorney made by the applicant and the recipient of his attorney is not legally valid. *Second*, the applicant's attorney violated the skepticism minister of defense and number: skep.168/III/2004 dated 18 March 2004 which resulted in the special power of attorney is made into premature. Subsequent violation is committed by the respondent I, he made a marriage without the permission of religious courts, and criminal offenses that forgery of identity and marriage licence from the competent superiors air base commander abdurachman saleh. *Third*, judges through the decision stated that the application the applicant is not accepted and to date the applicant is no longer just apply again to the district religious courts as a result of marriage the defendant of first and second respondent is ongoing. Not null and void, but they can only be canceled by the parties who feel aggrieved by the cancellation request process of marriage to religious courts in his area.

مستخلص البحث

عبد الله محروس زين، 0621ض0093، 2011: حكم الحاكم "عدم القبول" لطلب إبطال النكاح الثاني في المحكمة الشرعية التابعة للدائرة مالانج المديرية (دراسة على الحكم نمرة: PA. Kab. /2009 /Pdt.G/3666

(Mlg). المشرف: الدكتور سيف الله الماجستير

الكلمات الأساسية: حكم الحاكم "عدم القبول"، طلب، إبطال النكاح الثاني

في القانون الإندونيسي نمرة 1 سنة 1974 الذي يتكلم عن النكاح و مقتطفات الأحكام الإسلامية يعين نظام النكاح الصحيح عند الحكومة تعييننا واضحا. ولكن الأسف يوجد فريق من المجتمع الذين يجاوزون على هذا التعيين، مثل الدعوى نمرة PA. Kab. Mlg /2009 / Pdt.G /3666. حيث تكون المجاوزة هي تدليس الهوية و تدليس رسالة الإذن للنكاح التي هي من الموظف المسؤول لاستيفاء شروط النكاح الإدارية في إدارة الشؤون الدينية (١)، وكان الفاعل لهذه المجاوزة هو أحد الجنود الوطنيين الإندونيسيين (٢) وفي الحقيقة كان ذلك النكاح نكاح ثاني. ويسمى بالنكاح الثاني لأن الفاعل مازال عليه عقد النكاح بزوجه الأولى. ولكن في عملية طلب إبطال النكاح الثاني، لا تقبل المحكمة الشرعية طلب الطالب حتى يستمر النكاح الثاني. فلذلك هذه الحادثة تصير جذابة وصالحة للبحث من النواحي العديدة إما من ناحية مقتطفات الأحكام الإسلامية و إما من ناحية القانون الإندونيسي نمرة 1 سنة 1974 الذي يتكلم عن النكاح.

وفقا لما سبق ذكره من التقديم والتوضيح، وضع الباحث لبحثه المتواضع عدة المشكلات الجذابة. وهي (1) أساس الترجيح الذي يستخدمه الحاكم لفصل ذلك الدعوى، (2) أنواع المجاوزات الواقعة في ذلك الدعوى، و (3) العواقب من الحكم الذي قرره الحاكم لذلك الدعوى.

والنوع الذي يستخدمه الباحث هو بحث الحكم المتأسس على القاعدة السلوكية بالمدخل القانون الإندونيسي. ويستخدم في جمع البيانات طريقة المقابلة وطريقة التوثيق. وتحليل تلك البيانات يستخدم الباحث الطريقة الوصفية التحليلية. فلذلك تكون المادة الأساسية هي حكم الحاكم وتكون المادة الثانوية هي صادرة من المراجع العديدة أو الكتب المناسبة بالمشكلات الأساسية المبحوثة. ثم يعمل الباحث التحليل العميق حتى ينتج هو بعض الخلاصة، وهي: (1) في الدعوى نمرة: PA. Kab. Mlg /2009 / Pdt.G /3666. يلقي جلسة المحكمة الحكم "عدم القبول" لأن رسالة الطلب من الطالب التي يعملها ويوقع عليها المحامي يوجد فيها العيب الرسمي حتى يسبب إلى عمد صحتها. في نظرة المحكمة، (2) المحامي من الطالب يجاوز على رسالة القرار من وزير الشؤون الدفاعية والأمنية نمرة: 2004/III/168S. Kep بالتاريخ 18 مارس 2004. وهذه المجاوزة تسبب إلى صبرورة وثيقة التوكيل المخصصة تجعل مضطرا، والشكل المجاوزة التالي هو يعمل المدعى عليه الأول لأنه يعمل النكاح الثاني بدون إذن زوجته الأولى وبدون إذن المحكمة الشرعية، وكذلك يعمل المجاوزة التي هي تدليس الهوية وتدليس رسالة إذن النكاح من الموظف المسؤول وهو القائد لمطار عبد الرحمن صالح بمالانج، و (3) كانت جلسة المحكمة عن طريق حكمها قررت عن طلب الطالب غير مقبول وحتى الآن لا يجوز له تقديم الطلب الجديد للمحكمة الشرعية التابعة لدائرة مالانج المديرية حتى يسبب إلى استمرار عقد النكاح بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثانية، والنكاح بينهما غير باطل عند الحكم الإندونيسي بل يمكن لجميع القبل الخاسرين أن يعمل إبطال ذلك النكاح عن طريق عملية طلب ابطال النكاح الثاني للمحكمة الشرعية المحلية.